



Evaluasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo

Marjono^{1*}, Izza Mafruhah², Nurul Istiqomah²

¹Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo, Indonesia

²Universitas Sebelas Maret, Indonesia

*Email korespondensi: marjono84@yahoo.co.id

Diterima: 01/06/2025; Direvisi: 25/06/2025; Disetujui: 30/06/2025

Cara Sitasi: Marjono, M., Mafruhah, I., & Istiqomah, N. (2025). Evaluasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Sukowaskita: Media Informasi Penelitian Dan Pengembangan*, 1(1), 21-33. Retrieved from <https://jurnal.sukoharjokab.go.id/sukowaskita/article/view/3>

ABSTRAK

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan instrumen evaluasi kinerja tata kelola keuangan pemerintah daerah yang mencakup enam dimensi penilaian: kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja, transparansi pengelolaan keuangan, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian IPKD Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 serta membandingkannya dengan kabupaten lain dalam klaster kemampuan keuangan sedang dan wilayah Solo Raya. Hasil analisis menunjukkan bahwa IPKD Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan skor dari tahun sebelumnya, yakni dari 72,296 menjadi 78,780. Terdapat dua dimensi yang memiliki nilai optimal yaitu Dimensi dua tentang Pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dimensi enam yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Empat dimensi naik yaitu dimensi satu mengenai Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, Dimensi tiga tentang Transparansi pengelolaan keuangan daerah, dimensi empat mengenai Penyerapan Anggaran dan dimensi lima mengenai Kondisi Keuangan Daerah. Secara umum, capaian ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memperkuat akuntabilitas keuangan daerah, meskipun masih dibutuhkan strategi lanjutan untuk meningkatkan kualitas belanja publik dan kemandirian fiskal secara berkelanjutan.

Kata Kunci: IPKD, Keuangan Daerah, Tata Kelola Akuntabilitas Fiskal

ABSTRACT

The Regional Financial Management Index (IPKD) is an instrument for evaluating the performance of local government financial management, covering six dimensions of assessment: the suitability of planning and budgeting documents, the allocation of expenditure budgets, the transparency of financial management, budget absorption, regional financial conditions, and the opinion of the Supreme Audit Agency (BPK) on financial reports. This study aims to analyze the achievements of the IPKD in Sukoharjo Regency in 2024 and compare them with other regencies in the moderate financial capacity cluster and the Greater Solo area. The results of the analysis show that the IPKD of Sukoharjo Regency experienced an increase in score from the previous year, namely from 72.296 to 78.780. There are two dimensions that have optimal values, namely Dimension two on the allocation of expenditure in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and Dimension six, namely the opinion of the Supreme Audit Agency (BPK) on the Local Government Financial Report (LKPD). Four dimensions increased, namely Dimension One on the Conformity of Planning

and Budgeting Documents, Dimension Three on Transparency in Regional Financial Management, Dimension Four on Budget Absorption, and Dimension Five on Regional Financial Conditions. In general, these achievements demonstrate the commitment of the Sukoharjo Regency Government to strengthening regional financial accountability, although further strategies are still needed to improve the quality of public spending and sustainable fiscal independence.

Keywords: IPKD, Local Finance, Fiscal Accountability

PENDAHULUAN

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Keberadaan IPKD sangat relevan dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri. Penilaian ini tidak hanya berfungsi sebagai ukuran tata kelola keuangan, tetapi juga menjadi alat pembinaan serta dasar pemberian insentif bagi daerah. IPKD diatur melalui Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 dan merujuk pada dokumen siklus anggaran daerah seperti RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, APBD, LKPD, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam pelaksanaannya, IPKD diukur melalui enam dimensi utama, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini BPK atas laporan keuangan daerah. Setiap dimensi memiliki indikator yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan, mulai dari konsistensi perencanaan dan realisasi anggaran, proporsi belanja prioritas, keterbukaan informasi publik, efektivitas penyerapan anggaran, hingga kesehatan fiskal daerah. Hasil penilaian IPKD kemudian diklasifikasikan dalam tiga kategori, yakni A (baik), B (perlu perbaikan), dan C (sangat perlu perbaikan), yang selanjutnya digunakan sebagai acuan pembinaan maupun pemberian penghargaan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Selain sebagai alat monitoring, IPKD memiliki fungsi strategis dalam mendorong akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan dana publik. Bagi masyarakat, IPKD juga memberikan gambaran mengenai sejauh mana efektivitas anggaran daerah dapat mendukung pembangunan. Urgensi evaluasi IPKD semakin tinggi di era otonomi daerah, karena kemampuan pengelolaan keuangan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Regulasi seperti PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa evaluasi IPKD tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar pengelolaan keuangan daerah lebih akuntabel, efisien, partisipatif, dan sesuai prinsip good governance.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan objek kajian berupa capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Sukoharjo tahun 2024. IPKD merupakan instrumen penilaian kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan enam dimensi utama sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dimulai dari pengelompokan daerah dalam pengukuran IPKD, Selanjutnya yaitu perbandingan antar daerah pada level yang sama yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kendal, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Brebes.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi publikasi Kementerian Dalam Negeri, khususnya laporan IPKD Kabupaten Sukoharjo tahun 2024, serta dokumen pendukung seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), APBD, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menjelaskan kinerja pada setiap dimensi IPKD, yaitu: (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Pengalokasian anggaran belanja daerah, (3) Transparansi pengelolaan keuangan, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah, dan (6) Opini BPK atas laporan keuangan daerah. Setiap dimensi dianalisis berdasarkan indikator teknis yang relevan, kemudian dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional jika diperlukan, guna memberikan gambaran utuh atas tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

IPKD merupakan instrumen penting yang digunakan untuk mengukur tata kelola keuangan daerah secara objektif dan terstandar, berdasarkan enam dimensi penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Hasil penilaian ini tidak hanya merefleksikan capaian administratif, tetapi juga mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola anggaran secara transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Hasil perhitungan IPKD Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2022-2024 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan IPKD Tahun 2022-2024 Kabupaten Sukoharjo

Dimensi	Score				
	2022	2023	Status	2024	Status
D.1	13.429	11.91	Turun	13.329	Naik
D.2	20	20	Optimal	15	Turun
D.3	10.8621	11.638	Naik	14.741	Naik
D.4	10	10	Tetap	15	Naik
D.5	4.1495	3.748	Turun	5.71	Naik
D.6	15	15	Optimal	15	Optimal
TOTAL	73.441	72.296	Turun	78.78	Naik
NILAI	B	B	Turun	B	Naik

Tabel 1 menunjukkan bahwa secara total terjadi penurunan nilai IPKD dari tahun 2022 sebesar 1,145 point, dan terjadi peningkatan sebesar 6,484 point antara tahun 2023 sampai 2024. Berdasarkan data selama tiga tahun berturut-turut nilai IPKD Kabupaten Sukoharjo berada pada peringkat B artinya Perlu Perbaikan.

Pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai IPKD sebesar 1,145 poin dibandingkan tahun 2022. Namun, pada tahun 2024, nilai tersebut kembali meningkat signifikan sebesar 6,4848 poin. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan pada beberapa dimensi, yaitu Dimensi 1 naik 1,419 poin, Dimensi 3 naik 3,103 poin, Dimensi 4 naik 5 poin, dan Dimensi 5 naik 1,962 poin. Sementara itu, Dimensi 6 telah mencapai posisi optimal karena mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Penurunan justru terjadi pada Dimensi 2 yang sebelumnya mencapai nilai optimal, namun pada tahun 2024 turun sebesar 5 poin.

Dimensi yang memiliki nilai optimal mengalami penurunan hanya pada D6, dengan indikator penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian, dan terdapat lima dimensi yang belum optimal yaitu dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4 dan dimensi lima.

Dimensi 1 tentang Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran mengalami peningkatan sebesar 1,419 point, meskipun berdasarkan perbandingan antara tahun 2022 dengan tahun 2024 masih lebih rendah sebesar 0.1 point. Namun, sub indikator 1 mencatat dua program dalam RPJMD yang tidak terdapat dalam RKPD, yaitu Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Program Pengendalian Izin Usaha Industri. Selain itu, pada indikator 1.5 terdapat perbedaan antara pagu KUA-PPAS dan APBD sebanyak 132 kegiatan, dengan rincian 99 kegiatan melebihi pagu dan 33 kegiatan kurang dari pagu, sehingga skor hanya mencapai 0,451. Dimensi dua yaitu kualitas anggaran mengalami penurunan dimana yang semula optimal, namun pada tahun ini mengalami penurunan. Penurunan Dimensi dua yang sebelumnya optimal dengan nilai 20, tahun 2023 menjadi 15 disebabkan oleh alokasi dana infrastruktur yang memiliki skor 0 (nol). Daerah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana dengan persentase/proporsi tertentu untuk anggaran belanja wajib sesuai dengan peraturan perundangan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana belanja wajib minimal tertentu. Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi alokasi pendidikan sebesar 30,2% (di atas batas minimal 20%), dan kesehatan sebesar 23,6% (di atas minimal 10%), namun alokasi untuk infrastruktur hanya mencapai 23,1%, masih di bawah kewajiban 25% dari APBD.

Dimensi tiga mengalami peningkatan sebesar 3.103 dari tahun 2022 ke tahun 2023, dan juga mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya sebesar 0.776. Nilai ketepatan waktu adalah sebesar 1 atau optimal dan nilai keteraksesan sebesar 0,966. Secara detail seluruh dokumen atau 20 dokumen yang telah memenuhi indikator ketepatan waktu yaitu tanggal unggah dokumen melebihi 30 hari dari tanggal penetapan. Dan terdapat 1 dokumen yang tidak memenuhi indikator keteraksesan yaitu Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD.

Dimensi empat meskipun belum optimal namun mengalami peningkatan nilai menjadi 15. Dari empat indikator terdapat satu indikator yang belum memenuhi adalah Belanja Tak Terduga dengan memiliki nilai keterserapan anggaran sebesar 2,622 % sehingga mendapatkan point penilaian 0 (nol). Sedangkan ketiga indikator yang lain yaitu Belanja Operasional dengan nilai 94,975 %; Belanja Modal sebesar 92,747 % dan Belanja Transfer 99,861 % memiliki nilai optimal dengan nilai 1. Permasalahan paling besar dalam dimensi ini adalah skor belanja tak terduga yang sangat rendah, karena selama ini baru beberapa program kegiatan terkait dengan kebencanaan yang tidak terserap. Pengertian belanja tak terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak bisa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Perhitungan dimensi lima mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2023 adalah sebesar 3,78 dan meningkat menjadi sebesar 5,71 pada tahun 2024. Walaupun mengalami peningkatan sebesar 1,93 point tetapi masih terdapat selisih sebesar 9,29 point untuk sampai pada nilai idealnya yang sebesar 15 point. Indikator yang mengalami kenaikan adalah Indeks Kemandirian Keuangan, Indeks Solvabilitas Jangka Pendek, Indeks Solvabilitas Jangka Panjang serta Indeks Solvabilitas Layanan. Sedangkan indikator yang mengalami penurunan adalah Indeks Fleksibilitas Keuangan serta Indeks

Solvabilitas Operasional. Perbandingan nilai IPKD Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Dalam kategori daerah dengan Kemampuan Keuangan Sedang, Kabupaten Sukoharjo mempunyai indeks paling tinggi yaitu sebesar 78,78 dan tiga daerah lainnya mempunyai nilai indeks IPKD dibawah Sukoharjo. Apabila melihat perbandingan antar dimensi, Kabupaten Sukoharjo mempunyai 3 nilai tertinggi, yaitu pada Dimensi 1, Dimensi 3 dan Dimensi 5 seperti yang terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. IPKD Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Sedang

Dimensi	Score			
	Sukoharjo	Kendal	Rembang	Brebes
D.1	13.329	11.828	9.134	9.625
D.2	15.000	15.000	15.000	15.000
D.3	14.741	14.483	11.638	13.448
D.4	15.000	15.000	20.000	10.000
D.5	5.710	4.256	3.347	3.827
D.6	15.000	15.000	15.000	15.000
TOTAL	78.780	75.566	74.119	66.900
NILAI	Baik	Baik	Baik	Baik

Pemerintah Kabupaten Kendal mempunyai nilai IPKD pada tahun 2023 adalah sebesar 75,566 dan diikuti oleh Kabupaten Rembang sebesar 74,119 dan Kabupaten Brebes dengan nilai IPKD sebesar 66,90. Apabila perkembangan nilai IPKD berdasarkan dimensi selama 2 tahun dibandingkan, maka berikut ini adalah rincian datanya.

Tabel 3. Perkembangan Nilai IPKD Daerah dengan Keuangan Sedang

Kab/Dimensi	D.1		D.2		D.3		D.4		D.5		D.6		TOTAL	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Sukoharjo	11,91	13,33	20	15	11,64	14,74	10	15	3,75	5,71	15	15	72,30	78,78
Kendal	10,76	11,83	19,83	15	7,50	14,48	15	15	2,55	4,26	15	15	70,64	75,57
Rembang	10,80	9,13	14,83	15	7,50	11,64	10	20	4,49	3,35	15	15	62,63	74,12
Brebes	9,16	9,63	19,83	15	10,86	13,45	15	10	2,94	3,83	15	15	72,79	66,90

Dimensi 1

Pada tahun 2023, Kabupaten Sukoharjo mencatat skor 13,329 pada Dimensi 1, meningkat dari 11,91 pada tahun sebelumnya atau naik sebesar 1,419 poin (sekitar 11,91%). Pencapaian ini menempatkan Sukoharjo sebagai daerah dengan nilai tertinggi pada dimensi kesesuaian perencanaan dan penganggaran dibandingkan daerah sejenis, sekaligus menunjukkan adanya perbaikan dalam sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD. Peningkatan tersebut didukung oleh konsistensi perencanaan dan anggaran yang semakin baik, penyusunan pembangunan yang lebih terarah dan berbasis prioritas, keterpaduan program antar-SKPD yang mengurangi tumpang tindih kegiatan, serta partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam proses Musrenbang. Transparansi dalam penyusunan dokumen juga meningkat melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang memungkinkan penyusunan perencanaan dan anggaran lebih presisi dan terdokumentasi.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan masih terdapat deviasi kecil antara RPJMD dan RKPD, di mana capaian subdimensi turun dari nilai optimal menjadi 0,992

akibat kendala teknis, keterbatasan data, atau kurangnya koordinasi antar-OPD. Hal serupa juga terlihat pada hubungan pagu KUA-PPAS dan APBD yang menurun dari 0,572 pada tahun 2022 menjadi 0,451 di tahun 2023, dipengaruhi oleh perubahan signifikan dalam pembahasan RAPBD serta ketidakpastian fiskal, khususnya terkait dana transfer pusat dan capaian PAD. Sebaliknya, indikator lain seperti keterkaitan RKPD dengan KUA-PPAS maupun kesesuaian antara KUA-PPAS dan APBD sudah mencapai skor optimal (1,0), bahkan tertinggi di Jawa Tengah. Dengan rata-rata skor 0,889, kinerja Dimensi 1 di Sukoharjo dapat dikatakan sangat baik, menjadikannya sebagai fondasi penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Kualitas dokumen perencanaan yang terjaga akan berdampak langsung pada ketepatan pelaksanaan anggaran, efisiensi belanja, serta akuntabilitas penggunaan dana publik.

Dimensi 2

Dimensi 2 mengevaluasi kualitas pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, dengan fokus pada pemenuhan mandatory spending untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Nilai optimal dimensi ini mencerminkan bagaimana pemerintah daerah menyusun anggaran secara proporsional, efisien, dan mendukung pembangunan jangka panjang.

Pada tahun 2022, Kabupaten Sukoharjo berhasil meraih nilai maksimal sebesar 20, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 15. Penurunan ini juga dialami oleh seluruh kabupaten dalam klaster daerah dengan kemampuan keuangan sedang, dengan rata-rata capaian nilai yang sama.

Berdasarkan data subdimensi, nilai terendah berasal dari alokasi belanja infrastruktur, yang pada tahun 2023 tercatat 0. Hal ini menandakan bahwa alokasi belanja infrastruktur belum mencapai ambang batas minimal 25% dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri No. 19 Tahun 2020 dan panduan teknis IPKD. Kondisi ini menjadi penyumbang utama turunya skor IPKD Dimensi 2.

Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya belanja infrastruktur adalah penurunan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari pemerintah pusat. DAK Fisik, yang biasanya dialokasikan untuk kegiatan pembangunan fisik seperti jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi, mengalami penurunan drastis di Sukoharjo pada tahun 2023. Sebagai contoh, DAK Fisik untuk bidang jalan reguler dan penugasan turun dari total lebih dari Rp9 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp0 pada tahun 2023. Begitu pula dengan bidang sanitasi yang sebelumnya dialokasikan Rp500 juta, juga tidak mendapatkan alokasi di tahun 2023.

Sebaliknya, beberapa sektor mengalami peningkatan, seperti bidang air minum yang pada 2022 tidak memperoleh alokasi namun di tahun 2023 menerima Rp2,6 miliar, serta bidang irigasi yang mengalami sedikit peningkatan.

Dimensi 3

Dimensi 3 menilai sejauh mana pemerintah daerah menyediakan informasi pengelolaan keuangan secara terbuka dan mudah diakses masyarakat. Transparansi merupakan unsur penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBD. Pada tahun 2023, nilai capaian Kabupaten Sukoharjo meningkat dari 11,638 menjadi 14,741, menjadikannya sebagai daerah dengan nilai tertinggi dalam klaster kemampuan keuangan daerah sedang, mengungguli Kabupaten Kendal, Rembang, dan Brebes.

Peningkatan signifikan ini utamanya didorong oleh perbaikan pada indikator

ketepatan waktu publikasi, yang mencapai nilai 1,00 pada tahun 2023. Artinya, seluruh dokumen keuangan telah berhasil dipublikasikan dalam waktu kurang dari 30 hari sejak disahkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kinerja ini sejajar dengan Kabupaten Kendal, sementara Rembang dan Brebes masih mencatat keterlambatan publikasi pada beberapa dokumen.

Namun demikian, indikator keteraksesan/ketersediaan masih menunjukkan ruang perbaikan. Beberapa dokumen yang seharusnya tersedia untuk publik belum sepenuhnya diunggah atau tidak dapat diakses dengan mudah melalui situs resmi pemerintah daerah. Hal ini berdampak pada nilai subdimensi keterbukaan informasi yang belum maksimal.

Dimensi 4

Dimensi 4 mengukur seberapa efisien pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Tingkat penyerapan anggaran mencerminkan kemampuan pengelolaan anggaran secara efektif agar kegiatan pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan sesuai rencana. Sasaran ideal dalam dimensi ini adalah minimal 80% dari total anggaran terserap.

Berdasarkan data tahun 2023, Kabupaten Sukoharjo menunjukkan peningkatan skor dari 10 (2022) menjadi 15 (2023), menandakan adanya perbaikan signifikan dalam pengelolaan realisasi anggaran. Meskipun demikian, Sukoharjo masih berada di bawah Kabupaten Rembang yang mencapai nilai maksimal 20. Kabupaten Kendal mencatat skor stabil di angka 15, sementara Kabupaten Brebes justru mengalami penurunan dari 15 menjadi 10.

Faktor Penghambat Penyerapan Anggaran

Salah satu penyebab utama nilai penyerapan belum mencapai skor maksimal adalah pada subdimensi Belanja Tidak Terduga (BTT). Hampir seluruh daerah dalam klaster keuangan sedang menghadapi kendala serupa.

BTT secara fungsional memang berbeda dari jenis belanja lainnya. Dana ini tidak dirancang untuk diserap penuh, melainkan sebagai cadangan untuk kondisi darurat seperti bencana alam, kejadian luar biasa (pandemi, wabah), atau keperluan mendesak yang tidak terprediksi sebelumnya. Penyaluran BTT pun memiliki prosedur ketat, termasuk penetapan status darurat oleh kepala daerah dan rekomendasi dari inspektorat.

Kondisi ini menjelaskan mengapa tingkat penyerapan BTT secara umum rendah dan sulit untuk memenuhi ambang batas 80% sebagaimana indikator dimensi lainnya. Oleh karena itu, terdapat ruang evaluasi terhadap standar penilaian subdimensi ini agar lebih kontekstual dengan fungsi sebenarnya dari dana tidak terduga.

Rekomendasi Strategis

Untuk meningkatkan nilai Dimensi 4 sekaligus memperkuat kualitas belanja daerah, Pemkab Sukoharjo dapat mempertimbangkan langkah-langkah berikut:

1. Peningkatan akurasi perencanaan kegiatan, agar tidak terjadi penundaan atau pengembalian anggaran akibat kegiatan yang tidak siap dilaksanakan.
2. Monitoring dan evaluasi berkala atas realisasi belanja, terutama pada triwulan kedua dan ketiga, sebagai bentuk pengendalian atas progres serapan.
3. Penguatan koordinasi antar-OPD agar kegiatan pengadaan dan pelaksanaan program dapat berjalan lebih selaras dengan jadwal anggaran.

Dimensi 5

Dimensi 5 dalam IPKD menggambarkan kondisi kesehatan fiskal daerah secara menyeluruh, mencakup kemandirian keuangan, fleksibilitas fiskal, serta solvabilitas operasional, jangka pendek, jangka panjang, dan layanan publik. Dimensi ini krusial karena menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan fungsinya secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Pada tahun 2023, Kabupaten Sukoharjo mencatat peningkatan skor dari 3,748 menjadi 5,71 dan menjadi daerah dengan nilai tertinggi di antara kabupaten dalam klaster kemampuan keuangan sedang, meskipun beberapa daerah seperti Rembang justru mengalami penurunan.

Kinerja Sukoharjo tercermin dari capaian indeks kemandirian keuangan sebesar 0,72, tertinggi dibandingkan kabupaten lain, yang menandakan semakin besarnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Namun, pada indeks fleksibilitas fiskal terjadi sedikit penurunan meski masih menjadi yang tertinggi; kondisi ini mencerminkan terbatasnya ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran. Untuk mengatasinya, strategi yang dapat ditempuh antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, digitalisasi pelayanan pajak, peningkatan layanan retribusi, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Indeks solvabilitas operasional di Sukoharjo justru mengalami penurunan, serupa dengan Rembang dan Brebes, yang menandakan risiko ketergantungan fiskal semakin besar. Oleh karena itu, upaya seperti optimalisasi PAD berbasis digital, audit potensi pendapatan, pemberdayaan BUMD, serta penguatan belanja modal produktif menjadi penting. Sebaliknya, capaian positif terlihat pada solvabilitas jangka pendek dengan peningkatan hingga 0,049, menunjukkan kapasitas fiskal jangka pendek yang semakin baik. Indeks solvabilitas jangka panjang bahkan mencatat lonjakan 378,79%, mengindikasikan stabilitas fiskal daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang, termasuk pengelolaan utang. Selain itu, solvabilitas layanan juga meningkat seiring dengan pengendalian penduduk dan proporsi belanja publik yang lebih seimbang. Secara keseluruhan, capaian ini memperlihatkan bahwa kondisi fiskal Sukoharjo semakin kuat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan dukungan PAD dan pengelolaan belanja yang relatif efektif.

Dimensi 6

Dimensi keenam dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) menilai opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan indikator tertinggi dalam audit keuangan dan mencerminkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Pada tahun 2023, keempat kabupaten dalam klaster kemampuan keuangan sedang—termasuk Kabupaten Sukoharjo—seluruhnya meraih opini WTP dari BPK atas laporan keuangan mereka. Dengan demikian, seluruh daerah tersebut memperoleh nilai maksimal 15,00 untuk dimensi ini. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa secara administratif dan akuntansi, Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi seluruh kewajiban pelaporan keuangan secara tepat waktu, akurat, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Perbandingan IPKD Kabupaten Sukoharjo dengan Daerah di Solo Raya

Tabel 3 memberikan gambaran komparatif, dilakukan perbandingan capaian IPKD antara Kabupaten Sukoharjo dengan beberapa kabupaten lain di kawasan Solo Raya,

yakni Boyolali, Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri. Dari data IPKD 2023 yang tersedia, Kabupaten Boyolali menempati posisi tertinggi dengan nilai total 80,267, disusul oleh Kabupaten Klaten (78,986), dan Kabupaten Sukoharjo di posisi ketiga dengan nilai 78,780. Meski perbedaannya sangat tipis, hal ini menunjukkan bahwa performa Sukoharjo relatif kompetitif dibandingkan kabupaten tetangga lainnya.

Tabel 3. Perkembangan Nilai IPKD Solo Raya

Kab/ Dimensi	D.1		D.2		D.3		D.4		D.5		D.6	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Sukoharjo	11,911	13,329	20	15	11,638	14,741	10	15	3,748	5,71	15	15
Sragen	14,890	14,455	19,655	15	8,534	10,862	15	15	2,47	4,59	15	15
Klaten	9,192	5,430	20	20	15,000	14,741	10	15	2,803	2,803	15	15
Boyolali	6,876	9,373	20	20	9,569	10,086	15	20	3,101	5,807	15	15
Karanganyar	4,572	5,430	14,138	19,828	0	11,638	15	20	3,132	6,565	15	15

Dimensi 1

Daerah yang mengalami peningkatan pada dimensi 1 adalah Kabupaten Sukoharjo, Boyolali dan Karanganyar. Sedangkan Kabupaten Sragen mengalami penurunan sedikit pada tahun 2023, dan Kabupaten Klaten penurunannya sangat signifikan. Kondisi Kesesuaian RPJMD dengan RKPD untuk Kabupaten Sukoharjo dan Sragen sama persis, dimana mengalami penurunan dengan skor yang sama. Sedangkan untuk Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan tetapi dalam skala yang kecil. Kabupaten Klaten dan Boyolali mempunyai trend menurun. Sehingga bisa disimpulkan untuk kinerja tersebut daerah Sukoharjo walaupun mengalami penurunan tetapi skor yang diperoleh masih cukup tinggi. Sedangkan untuk kondisi kesesuaian RKPD dengan KUA-PPAS, Kabupaten Sukoharjo lebih unggul karena pada tahun 2023 mengalami peningkatan untuk skornya dan memperoleh skor yang maksimal. Kabupaten Sragen dan Klaten, nilai untuk sub dimensi tersebut mengalami penurunan sedangkan untuk Kabupaten Boyolali dan Karanganyar mengalami peningkatan.

Kabupaten Sukoharjo dan Sragen pada tahun 2023 berhasil menjaga capaiannya untuk perhitungan Kesesuaian KUA-PPAS dengan APBD, sedangkan Kabupaten Boyolali untuk perhitungannya sub dimensi tersebut mengalami kenaikan. Kabupaten Klaten dan Karanganyar perlu meningkatkan upayanya supaya kesesuaian KUA-PPAS dengan APBD semakin sinkron. Kabupaten Sukoharjo mempunyai prestasi dalam meningkatkan skor pada kesesuaian pagu RKPD dengan KUA-PPAS karena pertumbuhannya sangat signifikan sehingga pada tahun 2023 nilai yang diperoleh pada kondisi maksimal.

Dimensi 2

Kabupaten Sukoharjo, Sragen, Klaten, Boyolali dan Karanganyar untuk penilaian pada alokasi dana Pendidikan, dan Kesehatan sudah mencapai nilai yang maksimal. Catatan yang perlu diperbaiki hanya pada alokasi dana untuk infrastruktur saja terutama untuk daerah Kabupaten Sukoharjo dan Sragen. Sedangkan untuk alokasi Standar Pelayanan Minimal kondisinya sudah bagus karena untuk beberapa daerah mengalami trend peningkatan, sedangkan daerah Sukoharjo, Klaten dan Boyolali sudah dalam skor yang maksimal. alokasi dana untuk infrastruktur batas minimalnya adalah sebesar 25 %, dan pada tahun 2023 Kabupaten Boyolali dengan alokasi sebesar 47,40 %; Kabupaten Karanganyar sebesar 38,30 % dan Kabupaten Klaten yang mendapatkan skor maksimal. Sedangkan Kabupaten Sukoharjo dan Sragen karena nilai alokasinya dibawah 25 % maka skor yang diperoleh untuk sub dimensi tersebut adalah 0.

Dimensi 3

Dimensi tiga yang merupakan perhitungan untuk Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Sub dimensi ketepatan waktu yang mendapatkan nilai maksimal adalah Kabupaten Sukoharjo dengan nilai indeks sebesar 1, daerah lainnya masih belum optimal. Bahkan untuk Kabupaten Klaten mengalami penurunan dari 1 menjadi 0,966 dan Boyolali mengalami penurunan dari 0,655 menjadi 0,552 untuk pengukuran tersebut. Sedangkan untuk keteraksesan/ ketersediaan Kabupaten Klaten menorehkan prestasi karena berhasil menjaga skornya maksimal selama dua tahun berturut-turut. Kabupaten Karanganyar juga berhasil mencapai skor maksimal pada tahun 2023. Sedangkan Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan dari 0,931 menjadi 0,966 dan Boyolali mengalami peningkatan dari 0,621 menjadi 0,793 walaupun belum maksimal. Kabupaten Sragen yang mengalami penurunan pada penilaian keteraksesan.

Dimensi 4

Penyerapan anggaran untuk biaya operasional untuk semua daerah di Solo Raya sudah berada dalam skor yang maksimal baik pada tahun 2022 dan 2023. Sedangkan untuk Penyerapan Anggaran Belanja Modal pada tahun 2023 semua daerah juga sudah dalam kondisi yang bagus. Kabupaten Sukoharjo berhasil menaikkan kondisinya dari tahun 2022 yang masih belum optimal yaitu dari 0 menjadi 1. Sedangkan untuk Belanja Tidak Terduga, hanya Kabupaten dan Karanganyar yang serapannya sesuai dengan ketentuan. Sedangkan pada Kabupaten Sukoharjo (2,62 %), Sragen (3,84 %), dan Klaten (3,07 %) masih dibawah yang ditentukan. Hal ini mungkin berkaitan dengan tidak banyaknya kejadian tidak terduga pada kedua daerah tersebut. Serapan anggaran pada Belanja Transfer juga sudah berada dalam kondisi yang bagus untuk semua daerah di Solo Raya.

Dimensi 5

Pada dimensi 5 untuk sub dimensi Indeks Kemandirian Keuangan, capaian kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 adalah yang paling tinggi dengan skor sebesar 0,72. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Boyolali dengan skor sebesar 0,479 dan Kabupaten Karanganyar dengan skor sebesar 0,462.

Sub Dimensi untuk Indeks Fleksibilitas Keuangan, paling besar dicapai oleh Kabupaten Boyolali pada tahun 2023 dengan besaran skor yaitu 0,666 dan diikuti oleh Kabupaten Sukoharjo dengan nilai 0,553 kemudian Kabupaten Karanganyar dengan capaian 0,511. Indeks Solvabilitas Layanan pada tahun 2023 yang mendapatkan skor paling tinggi adalah Kabupaten Karanganyar dengan nilai sebesar 0,567. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Boyolalu dengan skor sebesar 0,365 dan Kabupaten Sragen dengan nilai sebesar 0,308. Kabupaten Sukoharjo posisinya berada dibawah Kabupaten Sragen.

Indeks Solvabilitas Jangka Pendek pada tahun 2023 yang mempunyai nilai skor paling tinggi adalah Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 0,049. Kemudian diikuti Kabupaten Karanganyar dengan skor sebesar 0,028; Kabupaten Boyolali dengan nilai 0,023; dan Kabupaten Klaten dengan nilai sebesar 0,022. Indeks Solvabilitas Jangka Panjang tahun 2023 yang mempunyai skor paling besar adalah Kabupaten Kabupaten Karanganyar dengan skor 0,892 dan diikuti oleh Kabupaten Sukoharjo dengan skor 0,632.

Sedangkan Indeks Solvabilitas Layanan pada tahun 2023 yang paling tinggi dicapai oleh Kabupaten Karanganyar dengan skor 0,163; diikuti oleh Kabupaten Boyolali dengan nilai sebesar 0,09. Kabupaten berikutnya yang mempunyai skor yang tinggi adalah

kabupaten Sragen dengan nilai sebesar 0,071 dan Kabupaten Sukoharjo dengan nilai 0,066.

Dimensi 6

Dimensi keenam dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dimensi ini mengevaluasi apakah LKPD telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, yang merupakan indikasi pengelolaan keuangan yang baik dan transparan. Kondisi yang dicapai oleh kabupaten yang ada di Daerah Solo Raya sudah optimal, karena untuk penilaian opini BPK atas laporan keuangan daerahnya berada dalam kondisi Wajar tanpa Pengecualian (WTP).

Peningkatan skor IPKD menunjukkan upaya serius dari Pemkab Sukoharjo dalam memperbaiki tata kelola keuangan. Namun, stagnasi pada nilai "B" mengindikasikan bahwa masih ada ruang perbaikan, terutama pada dimensi kualitas belanja (dimensi 2) dan kondisi keuangan daerah (dimensi 5). Beberapa tantangan yang perlu segera ditangani antara lain:

1. Optimalisasi alokasi belanja infrastruktur agar sesuai ketentuan mandatory spending
2. Peningkatan fleksibilitas fiskal untuk memperkuat kemampuan merespons kebutuhan daerah
3. Penguatan kapasitas perencanaan dan pelaporan keuangan berbasis outcome

Secara keseluruhan, penguatan IPKD akan mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah, peningkatan kualitas layanan publik, serta peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, diperoleh beberapa kesimpulan penting terkait kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Sukoharjo dalam tiga tahun terakhir berhasil meraih peringkat indeks IPKD kategori Baik. Meskipun demikian, terdapat fluktuasi nilai IPKD dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu dari empat daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kemampuan keuangan daerah kategori sedang, bersama Kabupaten Kendal, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Brebes. Dari keempat daerah tersebut, Sukoharjo memiliki nilai IPKD tertinggi yaitu 78,78, dengan nilai tertinggi pada Dimensi 1, 3, dan 5. Namun, pada Dimensi 4, Kabupaten Rembang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan Sukoharjo.

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah Solo Raya, Sukoharjo memang tidak berada pada level fiskal yang sama, namun tetap dapat dilihat posisinya. Pada tahun 2023, nilai IPKD Kabupaten Sukoharjo (78,780) masih berada di bawah Kabupaten Boyolali (80,267) dan Kabupaten Klaten (78,986). Meski begitu, Sukoharjo memiliki keunggulan pada Dimensi 1 dan 3 dengan capaian nilai tertinggi di antara ketiga daerah tersebut.

Selanjutnya diusulkan rekomendasi kebijakan sebagai berikut :

1. Dimensi Satu

Beberapa upaya yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesesuaian RPJMD dengan RKPD adalah :

- a. Penguatan Sinkronisasi Program dan Kegiatan OPD, dimana dibutuhkan review

terhadap program atau kegiatan yang ada di RKPD agar sesuai dengan prioritas pembangunan. Selain itu, OPD juga mencantumkan keterkaitan kegiatan secara eksplisit dengan tujuan/ sasaran RPJMD.

- b. Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai alat bantu integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.
- c. Integrasi Musrenbang dengan RPJMD, dimana terdapat proses penyaringan hasil Musrenbang di desa/ kelurahan dan kecamatan yang sesuai dengan prioritas RPJMD sebelum masuk ke RKPD.

Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada sub dimensi Kesesuaian RKPD dengan KUA-PPAS adalah :

- a. Melakukan harmonisasi redaksi dan pengkodean kegiatan antara RKPD dan KUA-PPAS.
- b. Memastikan semua kegiatan RKPD masuk dalam KUA-PPAS secara utuh, termasuk pagu, lokasi, dan indikator.
- c. Meningkatkan koordinasi antar-Bappeda dan BPKAD untuk integrasi dokumen perencanaan dan penganggaran.

2. Dimensi Dua

Penyebab penurunan adalah serapan pada anggaran infrastruktur, sehingga perlu menyusun perencanaan kegiatan infrastruktur berbasis kebutuhan riil masyarakat melalui musrenbang dan analisis kebutuhan infrastruktur. Selain itu juga bisa menetapkan prioritas proyek infrastruktur yang sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga bisa berfokus pada pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung, yaitu jalan, irigasi, air bersih, drainase yang manfaatnya segera dirasakan masyarakat atau bisa mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan multiplier effect yaitu pada sektor pariwisata.

3. Dimensi tiga

Penguatan terhadap Sistem Informasi Keuangan Daerah, yaitu memastikan platform atau laman resmi pemerintah daerah memiliki fitur aksesibilitas yang andal serta Melakukan uji coba keteraksesan setiap kali dokumen diunggah untuk memastikan file dapat dibuka oleh publik. Penguatan infrastruktur teknologi informasi juga diperlukan supaya terjadi peningkatan kapasitas server dan jaringan sehingga tidak terjadi kegagalan akses dokumen pada laman resmi.

4. Dimensi empat

Memperluas definisi keadaan darurat dalam penggunaan BTT, misalnya bukan hanya bencana alam, tetapi juga krisis kesehatan, inflasi ekstrem, atau keadaan sosial mendesak. Keadaan darurat tidak hanya merujuk pada kondisi bencana alam saja, melainkan juga keadaan darurat non fisik yang memberikan dampak langsung pada masyarakat dan memerlukan intervensi cepat pemerintah.

5. Dimensi lima

Cara untuk meningkatkan indeks fleksibilitas keuangan daerah adalah dengan melakukan :

- a. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama untuk pajak restoran, hotel, reklame, hiburan dan PBB.
- b. Penggunaan digitalisasi untuk pelayanan pajak sangat membantu meningkatkan

kemudahan dan kepatuhan.

- c. Pada retribusi daerah, supaya nilainya mengalami peningkatan maka memperbaiki kualitas layanan (parkir, pasar, perizinan) sehingga kesediaan masyarakat untuk membayar semakin meningkat.
 - d. Optimalisasi asset pemerintah yang idle sebagai salah satu sumber pendapatan.
- Langkah yang digunakan untuk meningkatkan indeks solvabilitas operasional adalah :
- a. Optimalisasi PAD, terutama dengan digitalisasi sehingga mengurangi kebocoran dan meningkatkan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak serta retribusi.
 - b. Melakukan audit potensi PAD secara berkala, untuk mengetahui potensi yang belum tergarap.
 - c. Pemberdayaan BUMD agar bisa menyumbang deviden ke kas daerah.
 - d. Belanja modal untuk kegiatan yang produktif terutama untuk pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi local perlu dilakukan, terutama untuk Pembangunan pasar, Kawasan pariwisata serta Kawasan UMKM.

REFERENSI

- Hutagalung, E. (2016). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, 42(1), 1-10. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i1.137>
- Farhan, Y., Sucipto, Y., Khadafi, U.S., Hakim, L., Mulyanti, E., & Prayitno, H. (2011). *Kupas Tuntas Hubungan Keuangan Pusat Daerah*. Seknas Fitra. Jakarta. Diakses dari <https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2021/12/01.-Kupas-Tuntas-Hubungan-Kuangan-Pusat-Daerah.pdf>
- Habibi, K. A., Imtikhanah, S., & Hidayah, R. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi Covid19. *Neraca*, 17(1), 122-147. <https://doi.org/10.48144/neraca.v17i1.598>
- Kanoli, A. D. S., Syamsul, S., & Zuhroh, S. (2023). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2019-2021. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(8), <https://doi.org/10.56338/jks.v6i8.3993>
- Mahendra, A., Faridah, F., & Oktarida, A. (2022). Analisis Rasio Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Di Kota Palembang Pada Tahun 2016-2020. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(8), 953-972. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i8.465>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- Putri, F. C. (2022). Kondisi Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Maneksi*, 11(2), 410-415. <https://doi.org/10.31959/jm.v11i2.1207>
- Rahmadi, S. & Hastuti, D. (2023). Pola Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 8(4), 1-16. <https://doi.org/10.22437/jpe.v18i4.30975>
- Runjung, R. M. R. P. K., Primastuti, A., & Riswati, R. (2022). Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 9(2), 96-111. <https://doi.org/10.33701/jekp.v9i2.2822>